

Analisis Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo

Neneng Hastuti Hidayat^{1*}, Idrus Usu², Ilyas Lamuda³, Deby Karundeng⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo

*email: nenenghidayat3@gmail.com

Abstract: This study uses a quantitative approach emphasizing the analysis on numerical data that is processed by statistical methods. This study aims to analyze the effect of the Regional Original Revenue component on government spending and analyze the Regional Original Revenue components which have a dominant influence on Regency and City government spending in Gorontalo Province. The results obtained are all components of Regency and City Original Revenue in Gorontalo Province which include Regional Taxes, Regional Levies, Separated Regional Wealth Management Revenues, and Other Legitimate Regional Original Revenues have a positive and significant influence on government spending in the area. Components of Regional Original Income which have a dominant influence on Regency and City government expenditures in Gorontalo Province are Other Legitimate Regional Original Income.

Keywords: local revenue, government expenditure

Abstrak: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal yang diolah dengan metode statistika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap pengeluaran pemerintah dan menganalisa komponen Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh dominan terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Gorontalo yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah di daerah tersebut. Komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki pengaruh dominan terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Gorontalo adalah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, pengeluaran pemerintah

Copyright (c) 2022 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran (Halim, 2002). APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.24 Tahun 2005). Sedangkan menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dalam Warsito Kawedar, dkk (2008), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Halim, 2009). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi.

Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi terjadi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relative mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada

masyarakat sangat bervariasi. Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Transformasi paradigma dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas vertikal (kepada Pemerintah) menjadi akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat di daerah) (Mardiasmo, 2002). Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah financial. Meski begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang di transfer ke Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah "dilaporkan" di perhitungan anggaran.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Warsito, dkk (2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Pengeluaran pemerintah yaitu dalam bentuk belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah salah satu provinsi yang diberi keleluasan untuk mengatur daerahnya sendiri dengan otonomi daerah. Provinsi Gorontalo sejak pemekaran dari Sulawesi Utara akhir tahun 2000 sampai tahun 2021 sudah terdiri dari 6 Kabupaten dan Kota yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Dan Kabupaten Gorontalo Utara. Keenam daerah ini pertumbuhan ekonominya berfluktuatif atau mengalami naik turun sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Semua Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Gorontalo merupakan daerah yang memiliki potensi daerah yang bisa dikembangkan. Potensi daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pendapatan yang bisa dikonversi dalam bentuk penerimaan dalam komponen Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam UU No.33 tahun 2004 sebagai salah satu sumber pendapatan dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan penjelasan dari UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

a. Hasil pajak daerah

Pajak Daerah menurut (Anonim, 2000) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak yang Dipungut di Daerah kabupaten/kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir

b. Hasil retribusi daerah

Retribusi daerah menurut (Anonim, 2000) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Fungsi Retribusi Daerah, dimana Pemungutan retribusi daerah yang dilaksanakan pemerintah memiliki fungsi sebagai berikut; Fungsi Penerimaan, Pungutan retribusi dijadikan alat untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat, Fungsi Pengaturan, Pungutan retribusi dipakai sebagai alat untuk menata kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, Fungsi Manfaat, Retribusi daerah hendaknya dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan Pendapatan Asli Daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Soediyono (2009) Pengeluaran konsumsi pemerintah yang biasa disebut pengeluaran pemerintah, *government expenditure* atau *government purchase* meliputi semua pengeluaran yang pemerintah secara langsung menerima balas jasanya. Menurut Mahmudi (2011), pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, pengeluaran tersebut bertujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengeluaran pemerintah adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 2001).

Menurut Sukirno dalam Mahmudi (2011) faktor yang bersifat ekonomi, politik dan sosial yang mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah, antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor yang bersifat ekonomi, adalah yang berhubungan dengan tujuan dalam pencapaian penggunaan tenaga penuh tanpa menimbulkan inflasi sehingga pertumbuhan perekonomian secara menyeluruh dapat berjalan pesat;
- b. Faktor bersifat politik dan sosial, adalah faktor yang memakai anggaran pengeluaran yang besar. Seperti menjaga pertahanan dan keamanan negara, bantuan-bantuan sosial, menjaga kestabilan politik dan lainnya.

Menurut Baldacci (2014) pengeluaran pemerintah merupakan hal yang penting, peningkatan pengeluaran barang dan jasa secara signifikan cenderung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setelah diberlakukannya otonomi daerah pengeluaran rutin pemerintah daerah masih memiliki kontribusi yang dominan jika dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan. Dalam struktur pengeluaran rutin, peranan belanja pegawai

masih sangat dominan, sedangkan dari struktur pengeluaran pembangunan peranan terbesar dari sektor transportasi. Hal ini mengindikasikan perubahan komposisi pengeluaran pemerintah daerah setelah diberlakukannya kebijakan otonomi daerah belum terjadi. Kebijakan otonomi daerah yang diterapkan ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam kebijakan pengelolaan anggaran daerah. Hal ini juga menyebabkan perubahan struktur penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang pada akhirnya mempengaruhi perubahan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 tahun 2004 disebutkan bahwa Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintahdaerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang – undangan.

Belanja daerah sangat berkaitan dengan anggaran daerah karena belanja daerah merupakan bagian dari anggaran daerah, hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber daya yang ada, maka diperlukan alokasi sesuai dengan prioritas dan penentuan kurun waktu atas alokasi tersebut. Menurut Erlina dkk (2012), anggaran negara/daerah adalah suatu rencana keuangan yang disusun untuk satu periode mendatang yang berisi tentang pendapatan dan belanja negara/daerah yang menggambarkan strategi pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk pembangunan negara/daerah yang juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan instrument politik. Sedangkan menurut Mardiasmo (2005) anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Aliran uang yang terkait dengan aktivitas pemerintahan akan mempengaruhi harga, lapangan kerja, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan beban pajak yang harus dibayar atas pelayanan yang diberikan pemerintah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan pentingnya anggaran pada sektor publik, yaitu: Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan

dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice), dan trade off, Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

METODE

Studi ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Pendekatan kuantitatif dilakukan pada studi inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nol.

Ditinjau dari tingkat penjelasan (level of explanation), penelitian ini bersifat asosiatif. Menurut Sugiyono (2002); penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih.

Adapun data yang diperoleh dari pendekatan empiris dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan teknik pengujian uji multiple regression (regresi berganda), yang dihitung dengan menggunakan perangkat lunak (soft ware) atau SPSS berupa paket program komputer. Penggunaan model uji multiple regression, akan membantu untuk melakukan identifikasi setiap variasi independen yang diteliti, sehingga tampak variabel mana dari variabel bebas yang sangat berpengaruh terhadap dependen variabel, baik secara parsial maupun secara serempak.

Penggunaan model uji multiple regression, akan membantu untuk melakukan identifikasi setiap variasi independen yang diteliti, sehingga tampak variabel mana dari variabel bebas yang sangat berpengaruh terhadap dependen variabel, baik secara parsial maupun secara serempak.

Adapun prosedur analisis data dalam penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji statistik baik uji F maupun uji t dengan formulasi sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e_i$$

Dimana;

Y = Pengeluaran Pemerintah

X₁ = Pajak Daerah

X_2	=	Retribusi Daerah
X_3	=	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
X_4	=	Lain-Lain PAD Yang Sah
b_0	=	Konstanta
b_1 - b_4	=	koefisien regresi
e_i	=	Faktor kesalahan

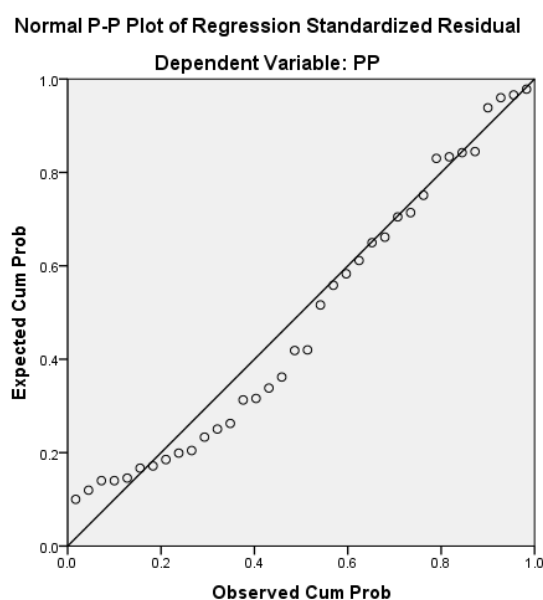
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Kelayakan Data

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah salah satu bagian dalam uji asumsi klasik untuk menilai kelayakan suatu data yang tersebar dalam kelompok data dinilai memiliki distribusi yang sesuai atau normal atau tidak. Pengujian ini bermaksud untuk penentuan data yang sudah dikumpulkan dengan cara populasi normal.

Uji normalitas bisa menggunakan grafik data plotting, dimana menurut Gozali (2011), model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data titik-titik yang tergambarkan secara nyata berdasarikutan garis yang ada secara diagonal. Untuk itu, uji normalitas data dalam penelitian ini seperti nampak di bawah ini



Gambar 1. Uji Normalitas Dengan P Plot
Sumber: Print Out SPSS, Data diolah, 2021

Gambar 1 memperlihatkan bahwa data penelitian menghasilkan sebaran titik yang mengikuti diagonal garis dan dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini menggunakan data yang berdistribusi secara normal.

Pengujian normal lainnya menggunakan uji kolmogorov smirnov. Pengujian ini adalah pengujian normalitas yang secara umum digunakan dalam program statistic yang banyak digunakan. Uji normalitas kolmogorov smirnov memegang konsep dasar yakni perbandingan pendistribusian data normal baku. Terapan uji ini secara signifikan berada 0,05 yang menandakan data tersebut memiliki peredaan signifikan. Berarti data tersebut dapat dikatakan tidak normal, dimana $p > 0,05$ berarti distribusi data normal. Adapun hasil uji normalitas data dengan kolmogorov smirnov dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Uji Normalitas Dengan Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000424
	Std. Deviation	169493841855.2064
		2000
Most Extreme Differences	Absolute	.119
	Positive	.119
	Negative	-.087
Test Statistic		.119
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Print Out SPSS, Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5.3 terlihat bahwa signifikansi menunjukkan nilai 0,200 yang menunjukkan $p > 0,05$ berarti distribusi data normal dan dapat dilanjutkan pada tahapan analisis berikutnya.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Model regresi yang dimaksud dalam hal ini antara lain: regresi linear, regresi logistik, regresi data panel dan cox regression. Dalam situasi terjadi

multikolinearitas dalam sebuah model regresi berganda, maka nilai koefisien beta dari sebuah variabel bebas atau variabel predictor dapat berubah secara dramatis apabila ada penambahan atau pengurangan variabel bebas di dalam model.

Oleh karena itu, multikolinearitas tidak mengurangi kekuatan prediksi secara simultan, namun mempengaruhi nilai prediksi dari sebuah variabel bebas. Nilai prediksi sebuah variabel bebas disini adalah koefisien beta. Oleh karena itu, sering kali kita bisa mendeteksi adanya multikolinearitas dengan adanya nilai standar error yang besar dari sebuah variabel bebas dalam model regresi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, jika terjadi multikolinearitas, maka sebuah variabel yang berkorelasi kuat dengan variabel lainnya di dalam model, kekuatan prediksinya tidak handal dan tidak stabil. Dan pengertian multikolinearitas adalah sesungguhnya terletak pada ada atau tidak adanya korelasi antar variabel bebas.

Uji multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat Tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10; maka tidak terjadi multikolinearitas, sebaliknya jika nilai Tolerance lebih kecil atau sama dengan 0,10; maka terjadi multikolinearitas. Apabila dilihat dari nilai VIF, maka korelasi antar variabel bisa dikatakan bebas multikolinearitas jika nilai VIF lebih kecil dari 10. Jika VIF lebih besar atau sama dengan 10, maka terjadi multikolinearitas. Uji multikolinearitas mendapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 2. Uji Multikolinearitas Dengan Nilai Tolerance dan VIF

Model		Coefficients^a	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PPD	.209	4.778
	HRD		3.129
		.320	
	HPKDY	.965	1.036
	DP		
	LLPADY	.450	2.222
	S		

a. Dependent Variable: PP

Sumber: Print Out SPSS, Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa semua nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10, sehingga bisa disimpulkan data analisis bebas multikolinearitas dan bisa dilanjutkan pada analisis berikutnya.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari tahu apakah terdapat penyimpangan atau penyelewengan pendapat atau asumsi atas tidaksamanya residual dengan varian berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan sesuai dengan model regresi yang ada. Dalam penggunaan model regresi ini, harus dipenuhi syarat tidak ditemukannya gejala heteroskedastisitas. Adapun metode yang bisa digunakan untuk mengujinya adalah dengan cara menguji Glesjer. Dalam uji ini dikerjakan dengan melakukan regresi antar variable yang independen dengan nilai yang absolut residualnya yakni ABS_RES. Jika nilai signifikansi antar variable independent dan absolut residu nya melebihi 0,5 maka permasalahan terkait heteroskedastisitas tidak akan muncul. Hasilnya dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	127913721415.147	35460982572.145		3.607	.001
	PPD	2.865	1.803	.563	1.589	.122
	HRD	-9.877	4.910	-.576	-2.012	.053
	HPKDYDP	-.191	6.578	-.005	-.029	.977
	LLPADYS	.383	.539	.172	.711	.482

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Print Out SPSS, Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residualnya lebih besar dari 0,05 sehingga bisa disimpulkan data analisis tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, jadi analisis selanjutnya menggunakan analisis regresi linier berganda bisa dilanjutkan.

2. Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis yang dikemukakan sebelumnya sebelumnya, maka pengujian hipotesis dapat dianalisis dengan menggunakan metode regresi linier berganda dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a							
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
Model		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	603559611590.076	76612471414.714		7.878	.000			
	PPD	1.305	3.895	.086	.335	.047	.208	.060	.039
	HRD	23.084	10.608	.450	2.176	.037	.057	.364	.254
	HPKDYDP	19.690	14.212	.165	1.385	.018	.211	.241	.162
	LLPADYS	5.994	1.164	.897	5.149	.000	.595	.679	.602

a. Dependent Variable: PP

Sumber: Print Out SPSS, Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, maka hasil penelitian ini memperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 603.559.611.590,076 + 0,086(X_1) + 0,450(X_2) + 0,165(X_3) + 0,897 (X_4)$$

Hasil persamaan regresi linier berganda yang diperoleh dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai 603.559.611.590,076 merupakan nilai konstansta yang berarti jika semua variabel bebas tidak ada (Nilai 0), maka pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Gorontalo berada pada nilai tersebut
- Nilai 0,086 (X_1) berarti jika ada penambahan 1 Rupiah nilai variabel Pajak Daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Gorontalo sebesar 0,086 dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
- Nilai 0,450 (X_2) berarti jika ada penambahan 1 Rupiah nilai variabel Retribusi Daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Gorontalo sebesar 0,450 dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
- Nilai 0,165 (X_3) berarti jika ada penambahan 1 Rupiah nilai variabel Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Gorontalo sebesar 0,165 dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
- Nilai 0,897 (X_4) berarti jika ada penambahan 1 Rupiah nilai variabel Lain-Lain PAD Yang Sah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Gorontalo sebesar 0,897 dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Pengujian t dilakukan guna mencari tahu variable independen yang secara parsial memberi dampak signifikan terhadap variable dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka menerima hipotesis alternatif, dimana satu variable independen secara partial memberi pengaruh terhadap variable dependen.

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah memiliki nilai $t = 0,335$ dengan nilai signifikansi 0,047; retribusi daerah memiliki nilai $t = 2,176$ dengan nilai signifikansi 0,037; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki nilai $t = 1,385$ dengan nilai signifikansi 0,018; lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki nilai $t = 5,149$ dengan nilai signifikansi 0,000. Dari data ini bisa disimpulkan semua variabel memiliki nilai t positif dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa semua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Uji Pengaruh Simultan

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.759 ^a	.576	.522	18009725732 1.75043	.576	10.550	4	31	.000

a. Predictors: (Constant), LLPADYS, HPKDYDP, HRD, PPD

Komponen Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan uji F, dimana uji ini untuk mengetahui pengaruh simultan semua variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dilihat pada tabel 5.5, dimana dari tabel diperoleh nilai F hitung (10,550) lebih besar dari F tabel (6,04) dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,000 lebih kecil dari nilai 0,05; maka bisa disimpulkan komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah.

Untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas digunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komponen PAD berpengaruh sebesar 75,9% terhadap pengeluaran pemerintah, sedangkan 24,1%

dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Karena nilai R Square mendekati nilai 1, maka dapat disimpulkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel sangat besar.

Hasil analisis dengan menggunakan regresi linier berganda memperoleh hasil yang merupakan pengujian terhadap hipotesis penelitian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo **terbukti**, hal ini didasarkan pada hasil uji hubungan dan keterpengaruhan baik secara parsial maupun simultan (Uji t dan Uji F) menunjukkan nilai positif dan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05
2. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh dominan terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo adalah pajak daerah **tidak terbukti**, hal ini didasarkan pada nilai koefisien regresi dan korelasi parsial dimana nilai tertinggi berada pada variabel lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (X4)

PEMBAHASAN

Ada beberapa hal yang dibisa dijabarkan sebagai berikut sebagai hasil pembahasan dari hasil penelitian yang ada, antara lain:

Pajak daerah memiliki pengaruh yang tinggi dan positif akan pengeluaran pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis regresi yang memperoleh koefisien regresi bernilai positif dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Hasil uji korelasi parsial mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh dominan terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan komponen PAD yang lain.

Secara statistik, hubungan antar variabel yang bernilai positif yang berarti memiliki hubungan yang sebanding lurus dimana jika pajak daerah mengalami kenaikan, maka pengeluaran pemerintah juga akan mengalami kenaikan. Demikian pula sebaliknya, jika pajak daerah mengalami penurunan, maka pengeluaran pemerintah daerah juga akan mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Juniawan, Suryantini (2018) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana alokasi Umum kepada Belanja Modal di Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Bali, dimana persamaan penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang kuat kepada Perbelanjaan Daerah. Akan tetapi, dalam penelitian terdahulu menambah dana perimbangan serta difokuskan pada belanja modal.

Retribusi daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah daerah. Hal tersebut dapat diambil pembuktiannya berdasarkan hasil analisis regresi yang memperoleh koefisien regresi bernilai positif dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Secara statistik, hubungan antar variabel yang bernilai positif terlihat searah hubungan antar satu sama lain atau menunjukkan hasil yang sebanding lurus. Dimana jika retribusi daerah mengalami kenaikan, maka belanja daerah juga akan mengalami kenaikan. Demikian pula belanja daerah akan menurun jika retribusi daerah mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian Masdjojo G.N, Sukartono (2009) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006-2008”, memiliki kesamaan dalam variabel PAD dan belanja daerah namun penelitian terdahulu menambahkan dana perimbangan serta metode analisis yang digunakan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis regresi yang memperoleh koefisien regresi bernilai positif dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Secara statistik, hubungan antar variabel yang bernilai positif menunjukkan hubungan yang searah atau berbanding lurus, dimana jika variabel independen yaitu Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik akan mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Gorontalo. Sebaliknya jika variabel ini mengalami penurunan, maka pengeluaran pemerintah juga akan mengalami penurunan.

Penelitian ini menghasilkan hasil yang jika diperbandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferina I, Husnaina P di tahun 2012 mengenai pengaruh PAD dengan DAU kepada Belanja Daerah di pemerintahan Kab/kota di Sumatera Barat. Memiliki

persamaan pada variabel PAD dan belanja daerah, namun penelitian terdahulu menambah Dana Alokasi Umum.

Pendapatan Asli Daerah lainnya yang memiliki pengaruh secara positif dan kuat terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Gorontalo adalah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hal tersebut dapat dilihat dari analisis regresi yang memperoleh koefisien regresi bernilai positif dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang merupakan variabel independen keempat dalam model penelitian ini merupakan variabel yang dominan mempengaruhi pengeluaran pemerintah dibandingkan komponen PAD yang lain. Secara statistik, hubungan antar variabel yang bernilai baik atau positif bias menunjukkan keterkaitan yang sebanding lurus dan searah, dimana jika lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan, pengeluaran pemerintah akan mengalami kenaikan juga. Demikian pula sebaliknya, jika PAD lain yang sah menurun, penurunan juga akan terjadi pada belanja daerah.

Hasil penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian Masayu R.W dan Catur M.F (2017) dengan topik yang sama yakni pengaruh dari PAD serta Dana Perimbangan kepada Pembelajaran Daerah Kota Bandung dimana memiliki persamaan pada variabel PAD dan belanja daerah, namun penelitian terdahulu menambah dana perimbangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa simpulan yaitu, jika dibandingkan seluruh Kabupaten dan Kota Di Provinsi Gorontalo, maka Pendapatan Asli Daerah terbesar ada pada Kota Gorontalo dengan penerimaan pendapatan asli daerah terbesar ada pada tahun 2019, ini dikarenakan Kota Gorontalo adalah pusat Ibukota yang dimana paling padat penduduknya dan didukung dengan akses dan berbagai fasilitas publik yang ada sehingga menyebabkan Kota Gorontalo menjadi Kabupate/Kota di Gorontalo yang paling besar penerimaan Pendapatannya. dan di Kota Gorontalo terdapat banyak sumber – sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah di antaranya pajak perhotelan, pajak rumah makan, pajak kendaraan dan pajak dari pusat- pusat perbelanjaan dan jasa- jasa lainnya.

Pengeluaran pemerintah terbesar berada di Kabupaten Gorontalo dikarenakan wilayahnya yang besar sehingga menimbulkan pembiayaan yang besar pula seperti belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tidak langsung terdiri dari

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi.

Seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah di daerah tersebut.

Komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki pengaruh dominan terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo adalah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hal ini dibuktikan dari koefisien korelasi parsial variabel ini memiliki nilai yang paling besar dibandingkan komponen PAD yang lain serta nilai signifikansi yang paling kecil.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, H. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Afiah, N. N. (2009). Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anonim. (2000). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Anonim. (2004a). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomisasi daerah.
- Anonim. (2004b). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah.
- Anonim. (2004c). Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah.
- Anonim. (2005). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Anonim. (2006). Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Anonim. (2010). Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Badrudin, R. (2011). Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Buletin Ekonomi.

- Deputi IV BPKP. (2005). Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi). Jakarta: BPKP.
- Erlina, dkk. (2015). Akuntansi Keuangan daerah Berbasis AkruaI Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Ghozali, I., (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gregorius N. Masdjojo dan Sukartono. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2008. TEMA Vol 6 Edisi 1, Maret 2009 hal 32 -50
- Halim, A., & Darmayanti, T. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: , Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Ika S F & , Husnaina P. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat). Eksistensi (ISSN 2085-2401), Vol. IV, No. 3, Desember 2012
- Listiorini, L. (2012). Fenomena Fly Paper Effect Pada Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara, Jurnal Keuangan & Bisnis Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan, 4(2), 111-126.
- Made A.J & Ni Putu Santi S.(2018). Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 3, 2018: 1255-1281 ISSN : 2302-8912. DOI: <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i03.p05>
- Mankiw, N. G. (2000). Teori Makro Ekonomi, Edisi Ke Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2008). Perpajakan edisi Revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Masayu R.W & Catur M.F. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 1, (1), 2017, 63-76. e2579-9991, p2579-9975. <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka>

- Murmaningtyas, V. W. K. (2007). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Retribusi Pasar serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2004-2006. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- Nabiyatun N.F, A.Nopiyanti, & Danang M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. EQUITY. Vol. 22, No.2, 2019, 197-214. DOI: 10.34209/equ.v22i2.936. P-ISSN 0216-8545 | E-ISSN 2684-9739
- Nur, M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Sulawesi Selatan. In Assets. Vol. 5, No. 1.
- Nurlis. (2016). The Factors Affecting of the Capital Expenditure Allocation Case: The Local Government of Indonesia. Research Journal of Finance and Accounting. ISSN 2222-2847. Vol. 7, No. 1. Hal. 107-113.
- Sarwono, Jonathan. (2015). Rumus-Rumus Populer Dalam SPSS 22 Untuk Riset, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam era otonomi dan Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 18(1).
- Sekaran, U. (2006). Research Methods For Business, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.
- Sesung, R. (2013). Hukum Otonomi Daerah: Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, Dan Daerah Otonomi Khusus. Bandung: Refika Aditama.
- Soleh, A. (2015). Analisis Belanja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Ekombis Review, 3(1).
- Susanti, D. A. (2017). Potensi Penerimaan Retribusi Pasar dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.